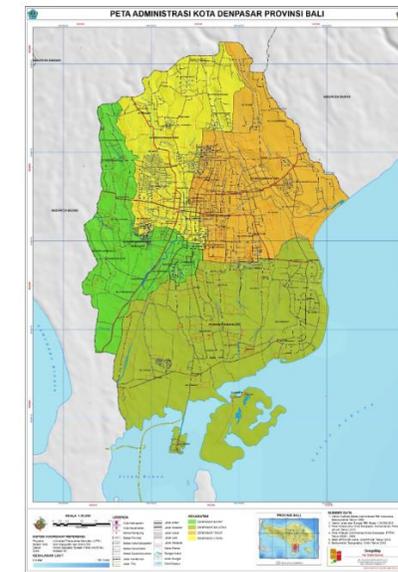


# KOTA DENPASAR

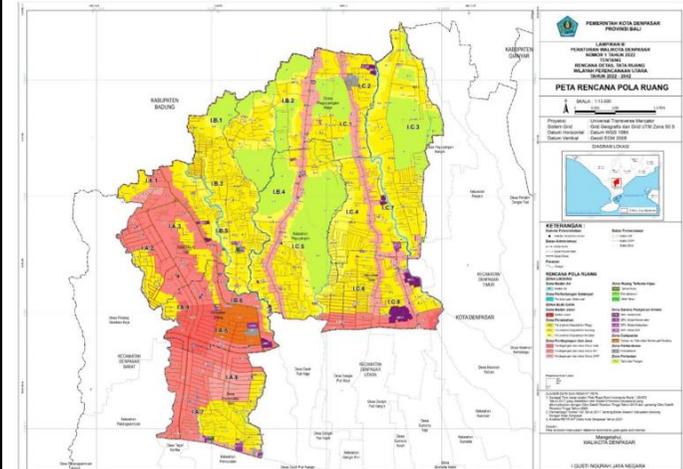
## 1. PROFIL KOTA

**Organisasi teritorial**, pembentukan Kota Denpasar ditetapkan pada tanggal 27 Februari 1788 Merdeka dari Kerajaan Badung, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. Berdasarkan Undang – undang tersebut wilayah Kota Denpasar terdiri dari wilayah 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Jumlah kecamatan yang berlaku sekarang menjadi 4 kecamatan sebagaimana tabel dibawah ini.

| No | KECAMATAN        | LUAS KECAMATAN<br>Km2 | %             | JUMLAH<br>KELURAHAN |
|----|------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1  | Denpasar Utara   | 31,42                 | 24,59         | 11                  |
| 2  | Denpasar Barat   | 24,06                 | 18,83         | 11                  |
| 3  | Denpasar Selatan | 49,99                 | 39,12         | 10                  |
| 4  | Denpasar Timur   | 22,31                 | 17,46         | 11                  |
|    | <b>TOTAL</b>     | <b>127,78</b>         | <b>100.00</b> | <b>43.00</b>        |

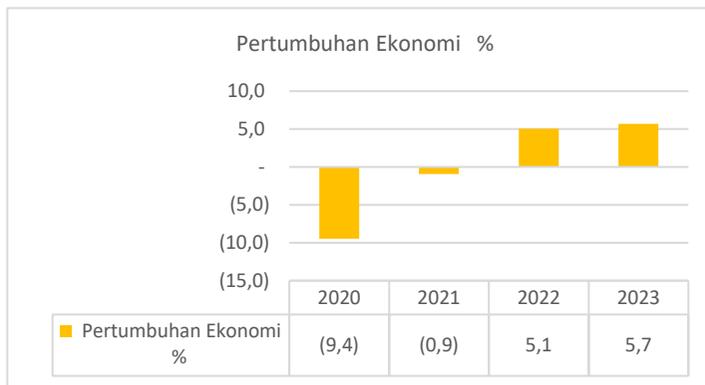


**Populasi**, Kota Denpasar, berdasarkan data Kota Denpasar Dalam Angka tahun 2024 (BPS) sebanyak 748.400 jiwa dan pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 0,030%. dengan tingkat kepadatan sebesar 5.881 jiwa/km<sup>2</sup>.



**Ekonomi**, kondisi perekonomian Kota Denpasar. terdiri dari:

- Selama kurun waktu tahun 2020-2023 perekonomian Kota Denpasar mengalami fluktuasi. Periode tahun 2020-2021 pertumbuhan perekonomian Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 8,52%, meningkat sebesar 5,94% pada kurun waktu tahun 2021-2022 dan meningkat sebesar 0,67% dalam kurun waktu tahun 2022-2023. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi ditahun 2020 sebesar -9,44% yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Denpasar pada tahun 2023 sebesar 5,69%.
- Kondisi PDRB ADHK Kota Denpasar setiap tahunnya mengalami fluktuasi, pada tahu 2020-2021 mengalami penurunan sebesar 0,01% yaitu dari Rp 32.740.224,18 milyar menjadi Rp 32.439.605,88 milyar. PDRB ADHK Kota Denpasar ditahun 2023 sebesar Rp 36.004.301,65 milyar mengalami peningkat sebesar 0,06% dibandingkan tahun tahun 2022.
- Tingkat inflasi di Kota Denpasar tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 2,54%, dimana lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2022 dengan nilai inflasi sebesar 6,44%. Penurunan inflasi di Kota Denpasar tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah Kota Denpasar yaitu dengan melaukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.
- Persentase penduduk miskin Kota Denpasar pada tahun 2020 sebesar 2,14%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,96% , serta pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,29% menjadi 2,68% dibandingkan tahun 2022.
- Tingkat pengangguran Terbuka di Kota Denpasar dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka sebesar 7,62%, kemudian turun menjai 7,02% pada tahun 2021 dan menurun kembali pada tahun 2023 sebesar 2,23% menjadi 5,08% dibandingkan tahun 2022.
- Gini Ratio Kota Denpasar sebesar 0,342 dimana lebih rendah 0,026 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 0,368.
- Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2020-2023 menunjukkan rata rata sebesar 84,26. Pada tahun 2023 IPM Kota Denpasar sebesar 84,68 poin termasuk kedalam kategori sangat tinggi. Dimana pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,29 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 84,39 poin. Peningkatan tersebut diantaranya disebabkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah.

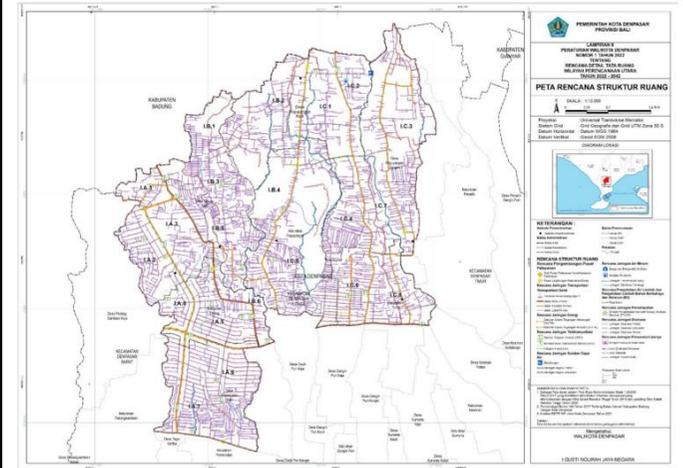


Manajemen utilitas: Kota Denpasar memiliki 5 perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang Jasa Penyediaan Air Bersih, air limbah dan sanitasi, Jasa Layanan Persampahan, terminal Tipe C, pasar dan pelabuhan dimana dalam pelaksanaannya perusahaan tersebut sampai dengan tahun 2023 masih didanai oleh APBD.

Staf kota, Jumlah Pegawai Negeri adalah sebanyak 7.402 orang dengan komposisi jabatan struktural 638 orang, jabatan fungsional umum 2.033 orang dan jabatan fungsional tertentu 4.731 orang, sementara P3K 2.436 orang. Berdasarkan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa jabatan masih memerlukan penambahan pegawai

Isu strategis Kota Denpasar

1. Penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Penanganan Stunting
3. Pengendalian Inflasi
4. Pengelohan Sampah
5. Penataan Utilitas Perkotaan



| Uraian                              | PNS           |                     |                 | PPPK            |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                                     | Struktural    | Fungsional Tertentu | Fungsional Umum | Total           |
| Pegawai yang tersedia (Eksisting)   | 638.00        | 4,731.00            | 2,033.00        | 2,436.00        |
| <b>Total</b>                        | <b>638.00</b> | <b>4,731.00</b>     | <b>2,033.00</b> | <b>2,436.00</b> |
| <b>%</b>                            | <b>8.62</b>   | <b>741.54</b>       | <b>42.97</b>    | <b>119.82</b>   |
| Kebutuhan pegawai Berdasarkan Anjab |               |                     |                 |                 |
| <b>Total</b>                        |               |                     |                 |                 |
| <b>%</b>                            |               |                     |                 |                 |

Rencana Investasi Kota Denpasar 10 tahun ke depan mempunyai 3 kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Perda no.7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah ke Perumda Air Minum Tirta Sewakardama dengan total biaya sebesar Rp 5,3 triliun selama 10 tahun dimulai tahun 2020 sampai tahun 2029 dimana sumber dananya berasal dari APBD.
2. Peraturan Walikota Denpasar no 6 tahun 2022 Tentang Penyerahan Barang Yang dinilai dengan uang/ Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakardama dengan total biaya Rp328 miliar dimana sumber pembiayaan berasal dari APBD.
3. Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Penyertaan Modal daerah Pada PT Penjaminan Kredit Daerah bali Mandara Prov Bali dengan total biaya sebesar Rp 5 milyar dimana sumber pembiayaan berasal dari APBD.

Permasalahan Pengelolaan keuangan daerah:

- Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan kota yang efektif dan efisien
- Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota dalam bidang peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,
- Terbatasnya anggaran yang dimiliki untuk penyertaan modal, kontribusi terhadap PAD kecil

## 1. SITUASI KEUANGAN<sup>1</sup>

Tabel Situasi Keuangan Kota Denpasar  
Tahun 2020-2023

| NO | URAIAN                                  | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>% |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|    |   | Realisasi (Rp)              | Realisasi (Rp)              | Realisasi (Rp)              | Realisasi (Rp)              |                               |
| 1  | PENDAPATAN                              |                             |                             |                             |                             |                               |
|    | A. Pendapatan Asli Daerah               | 731.261.280.905,53          | 792.362.413.752,87          | 888.051.855.597,36          | 1.198.372.000.165,54        | 18%                           |
|    | B. Pendapatan Transfer                  | 1.120.461.025.768,16        | 1.115.074.616.004,87        | 1.202.729.157.188,00        | 1.271.498.423.190,00        | 4%                            |
|    | C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 112.331.786.553,91          | 89.004.111.501,80           | 15.616.928.680,00           | 19.286.975.952,00           | -27%                          |
|    | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                | <b>1.964.054.093.227,60</b> | <b>1.996.441.141.259,54</b> | <b>2.106.397.941.465,36</b> | <b>2.489.157.399.307,54</b> | <b>8%</b>                     |
| 2  | BELANJA                                 |                             |                             |                             |                             |                               |
|    | A. Belanja Operasi                      | 1.046.538.292.529,20        | 1.631.497.454.343,68        | 1.655.230.464.949,19        | 1.786.272.801.389,14        | 22%                           |
|    | B. Belanja Modal                        | 803.727.738.539,50          | 102.374.462.143,83          | 198.780.902.642,39          | 331.864.232.394,00          | 25%                           |
|    | C. Belanja Tak Terduga                  | 34.287.080.777,91           | 30.712.586.396,20           | 6.970.660.255,00            | 3.991.373.722,00            | -43%                          |
|    | D. Belanja Transfer                     | -                           | 161.111.563.500,00          | 163.822.756.001,96          | 201.757.133.793,00          | 12%                           |
|    | <b>JUMLAH BELANJA</b>                   | <b>1.884.553.111.846,61</b> | <b>1.925.696.066.383,71</b> | <b>2.024.804.783.848,54</b> | <b>2.323.885.541.298,14</b> | <b>7%</b>                     |
| 3  | PEMBIAYAAN                              |                             |                             |                             |                             |                               |
|    | Penerimaan Pembiayaan                   | 237.423.789.571,01          | 316.302.054.510,00          | 378.347.176.697,14          | 448.940.334.313,96          | 24%                           |
|    | Pengeluaran Pembiayaan                  | 4.122.716.442,00            | 8.699.952.688,00            | 11.000.000.000,00           | 35.576.405.088,00           | 120%                          |
|    | <b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>                 | <b>233.301.073.129,01</b>   | <b>307.602.101.822,00</b>   | <b>367.347.176.697,14</b>   | <b>413.363.929.225,96</b>   | <b>21%</b>                    |

Kurs<sup>2</sup>: 1 US \$ = Rp. 16.100,00

Indeks inflasi<sup>3</sup>: indeks inflasi tahun 2020=1.49%, 2021= 1.49%, 2022 = 4.99%, 2023 = 2.84%

- Rata rata Pendapatan Kota Denpasar dalam kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) adalah sebesar Rp.2,139 milyar atau pertumbuhan rata rata pertahun adalah sebesar 8%. Pada 2023 Total Pendapatan Kota Denpasar adalah sebesar Rp.2,48 triliun.

- Rata rata belanja Kota Denpasar dalam kurun waktu 4 tahun (2020 – 2023) adalah sebesar Rp 2,039 triliun atau pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 7%. Posisi belanja pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.2,323 triliun mengalami peningkatan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- Komposisi belanja pada tahun 2023

Pada tabel situasi keuangan menunjukkan bahwa komposisi belanja operasi pada tahun 2023 adalah sebesar 77% memiliki proporsi paling tinggi dari total belanja daera. Perbanding antara belanja operasi dengan belanja modal adalah kurang lebih 5,4 : 1 (belanja modal hanya sebesar 14%)

<sup>1</sup> Laporan ringkasan pada bagian situasi keuangan kota adalah penjelasan data tahun terakhir

<sup>2</sup> Kurs terhadap dollar merupakan kesepakatan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia yang merupakan titik tengah antara kurs jual dan kurs beli

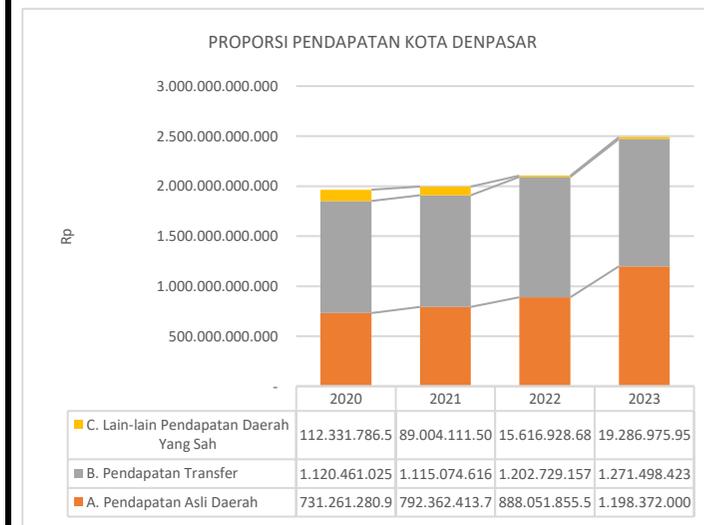
<sup>3</sup> Tingkat infalsi bersumber dari data badan pusat statistic yang ada di daerah



Proporsi belanja dalam APBD masih belum ideal jika menggunakan pemenuhan Mandat UU no 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP 1 tahun 2024. tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (rata rata selama 4 tahun)

**2. ANALISIS HISTORIS: PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

Pertumbuhan rata rata pendapatan Kota Denpasar adalah sebesar 8%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.



Proporsi Pendapatan transfer rata rata sebesar 51,1%, Pendapatan Asli Daerah rata rata sebesar 48,18% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah rata rata sebesar 0,8%, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah di Kota Denpasar masih bergantung kepada pemerintah pusat.

**Kesimpulan Pendapatan Daerah :**

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar rata-rata pertahun sebesar Rp. 2,139 triliun atau 42% dari total pendapatan, hal ini menunjukkan pengelolaan pendapatan asli yang dikelola oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam kategori baik. Sektor Pendapatan Asli Daerah tertinggi diperoleh dari pendapatan pajak daerah.

- Tingkat ketergantungan terhadap dana transfer Kota Denpasar masuk dalam kategori rendah
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan ini menunjukkan tren peningkatan dari Rp 731,261 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1,198,372 miliar pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18%.
- Pendapatan Transfer: Juga meningkat dari Rp 1,120,461 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1,271,498 miliar pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Menurun drastis dari Rp 112,331 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 19,286 miliar pada tahun 2023, dengan rata-rata penurunan sebesar -27%.

**Tabel Belanja Kota Denpasar  
Tahun 2020-2023**

| URAIAN                 | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | Proporsi Belanja<br>% | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>% |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                        | Realisasi (Rp)              | Realisasi (Rp)              | Realisasi (Rp)              | Realisasi (Rp)              |                       |                               |
| <b>BELANJA</b>         |                             |                             |                             |                             |                       |                               |
| A. Belanja Operasi     | 1.046.538.292.529,20        | 1.631.497.454.343,68        | 1.655.230.464.949,19        | 1.786.272.801.389,14        | 77%                   | 22%                           |
| B. Belanja Modal       | 803.727.738.539,50          | 102.374.462.143,83          | 198.780.902.642,39          | 331.864.232.394,00          | 14%                   | 25%                           |
| C. Belanja Tak Terduga | 34.287.080.777,91           | 30.712.586.396,20           | 6.970.660.255,00            | 3.991.373.722,00            | 0,2%                  | -43%                          |
| D. Belanja Transfer    | -                           | 161.111.563.500,00          | 163.822.756.001,96          | 201.757.133.793,00          | 9%                    | 12%                           |
| <b>TOTAL BELANJA</b>   | <b>1.884.553.111.846,61</b> | <b>1.925.696.066.383,71</b> | <b>2.024.804.783.848,54</b> | <b>2.323.885.541.298,14</b> | <b>100%</b>           | <b>7%</b>                     |

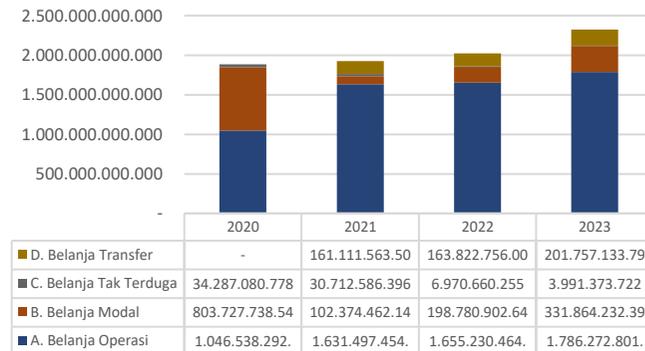
Rata-rata pertumbuhan total belanja daerah Kota Denpasar selama 4 tahun (2020 – 2023) sebesar 7% . Sedangkan proporsi belanja daerah terbesar yaitu pada Belanja Operasi sebesar 77% . dari total belanja. Berdasarkan data diatas bahwa belanja operasi setiap tahunnya meningkat dengan pertumbuhan rata rata pertahun sebesar 22% sampai tahun 2023

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Denpasar  
Tahun 2020-2023**

| Tahun | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | Selisih Lebih/Kurang |
|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2020  | 2.180.779.275.573        | 1.884.553.111.847        | (296.226.163.727)    |
| 2021  | 2.043.312.889.987        | 1.764.584.502.884        | (278.728.387.103)    |
| 2022  | 2.191.261.214.862        | 1.860.982.027.847        | (330.279.187.015)    |
| 2023  | <b>2.548.363.253.679</b> | <b>2.122.128.407.505</b> | (426.234.846.174)    |

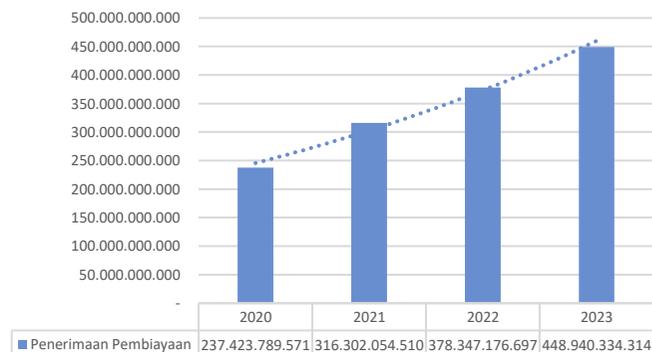
Berdasarkan data tersebut diatas bahwa Belanja Daerah Kota Denpasar tahun 2020-2023 menunjukkan adanya selisih kurang (bersaldo negatif) yang menunjukkan adanya efisiensi dan penghematan anggaran pada Pemerintah Kota Denpasar karena realisasi yang dicapai tidak melebihi anggaran. Hal ini menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan kinerja yang telah dicapai.

**PROPORSI BELANJA KOTA DENPASAR**



Penerimaan pembiayaan kurun waktu 2020 – 2023 cenderung terjadi kenaikan. Kenaikan Penerimaan pembiayaan kontribusi terbesar berasal dari Penggunaan SILPA

**Penerimaan Pembiayaan**



**Pembiayaan Kota Denpasar**

**Tabel Pembiayaan Kota Denpasar  
Tahun 2020-2023**

| URAIAN  | 2020                      | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   | Realisasi (Rp)            | Realisasi (Rp)            | Realisasi (Rp)            | Realisasi (Rp)            |
| <b>PEMBIAYAAN</b>   |                           |                           |                           |                           |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                              |                           |                           |                           |                           |
| Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya                         | 237.423.789.571,01        | 312.802.054.510,00        | 378.347.176.697,14        | 448.940.334.313,96        |
| Pencairan Dana Cadangan                                   |                           |                           |                           |                           |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan           |                           |                           |                           |                           |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat             |                           |                           |                           |                           |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain       |                           |                           |                           |                           |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank        |                           |                           |                           |                           |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank  |                           |                           |                           |                           |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah) |                           |                           |                           |                           |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah              |                           | 3.500.000.000,00          |                           | 0,00                      |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya                             |                           |                           |                           |                           |
| Penerimaan Piutang Daerah                                 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                       | <b>237.423.789.571,01</b> | <b>316.302.054.510,00</b> | <b>378.347.176.697,14</b> | <b>448.940.334.313,96</b> |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                             |                           |                           |                           |                           |
| Pembentukan Dana Cadangan                                 |                           | 8.699.952.688,00          |                           |                           |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                        | 4.122.716.442,00          |                           | 11.000.000.000,00         | 35.576.405.088,00         |
| Penyertaan Modal Pemerintah Pusat                         |                           |                           |                           |                           |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat                 |                           |                           |                           |                           |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain           |                           |                           |                           |                           |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank            |                           |                           |                           |                           |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank      |                           |                           |                           |                           |
| Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)     |                           |                           |                           |                           |
| Pemberian Pinjaman Daerah                                 |                           |                           |                           |                           |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya                            |                           |                           |                           |                           |
| <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                      | <b>4.122.716.442,00</b>   | <b>8.699.952.688,00</b>   | <b>11.000.000.000,00</b>  | <b>35.576.405.088,00</b>  |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                   | <b>233.301.073.129,01</b> | <b>307.602.101.822,00</b> | <b>367.347.176.697,14</b> | <b>413.363.929.225,96</b> |
| <b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN</b>                     | <b>312.802.054.510,00</b> | <b>378.347.176.697,83</b> | <b>448.940.334.313,96</b> | <b>578.635.787.235,36</b> |

Pengeluaran pembiayaan kurun waktu 2020 – 2023 cenderung terjadi penurunan



1. **Penerimaan Pembiayaan:**

- **Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya:** Ini adalah sumber utama penerimaan pembiayaan, yang terus meningkat dari Rp 237,423 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 448,940 miliar pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki surplus anggaran yang cukup besar dari tahun sebelumnya.
- **Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank:** Pada tahun 2021, terdapat penerimaan sebesar Rp 3,500 miliar dari pinjaman ini, tetapi tidak ada penerimaan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

2. **Pengeluaran Pembiayaan:**

- **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah:** Pengeluaran ini meningkat dari Rp 4,122 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 35,576 miliar pada tahun 2023, menunjukkan komitmen daerah untuk berinvestasi pada modal pemerintah.
- **Pembiayaan Netto:** Jumlah ini terus meningkat dari Rp 233,301 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 413,363 miliar pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan pembiayaan bersih daerah.

3. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran:**

- Ini adalah sisa pembiayaan setelah semua pengeluaran dan penerimaan pembiayaan dihitung. Jumlah ini juga meningkat signifikan dari Rp 312,802 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 578,635 miliar pada tahun 2023, menunjukkan bahwa daerah ini mampu mengelola pembiayaan dengan baik dan memiliki sisa yang signifikan setiap tahun

**Kesimpulan belanja daerah**

- Bahwa kecenderungan proporsi belanja daerah kota SEMARANG lebih kepada belanja operasi sebesar > 75%. atau rata rata pertahun Rp 3,817,869,629,632,-. Hal ini menunjukkan bahwa proses penganggaran masih terdapat kelemahan dimana proporsi belanja modal masih kecil.
- Belanja Operasi: Terus meningkat dari Rp 1,046,538 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1,786,272 miliar pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22%.
- Belanja Modal: Menurun dari Rp 803,727 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 331,884 miliar pada tahun 2023, dengan rata-rata penurunan sebesar -25%.
- Belanja Tak Terduga: Menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -43%.
- Belanja Transfer: Meningkat dari Rp 29,050 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 204,757 miliar pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 107%.

**Kesimpulan Pembiayaan**

- Penerimaan Pembiayaan: Meningkat dari Rp 237,423 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 448,934 miliar pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24%.
- Pengeluaran Pembiayaan: Relatif stabil dari Rp 4,122 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 11,000 miliar pada tahun 2022, dengan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp 37,576 miliar.

**Dari data diatas kondisi keuangan Kota Denpasar dapat dianalisis sebagai berikut:**

1. **Pertumbuhan Pendapatan:**

- Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer mengalami pertumbuhan yang baik, menunjukkan kemampuan daerah untuk meningkatkan sumber pendapatannya.
- Penurunan signifikan pada pendapatan lain-lain dapat mengindikasikan penurunan kontribusi dari sumber-sumber pendapatan non-reguler atau tak terduga.

2. **Pengeluaran Belanja:**

- Peningkatan belanja operasi menunjukkan peningkatan dalam pengeluaran untuk operasional rutin, yang bisa mencakup gaji, barang dan jasa, serta pemeliharaan.
- Penurunan belanja modal dapat berdampak pada investasi jangka panjang dan pengembangan infrastruktur.
- Fluktuasi belanja tak terduga menunjukkan adanya pengeluaran yang tidak terduga yang signifikan pada tahun-tahun tertentu.

3. **Pembiayaan:**

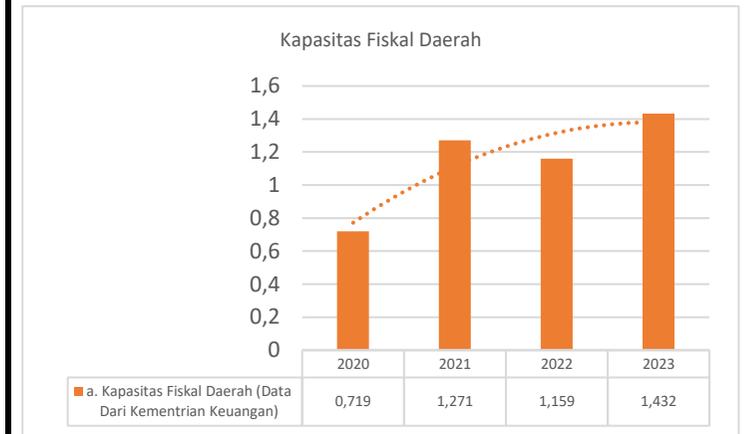
- Peningkatan penerimaan pembiayaan menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan untuk mengakses sumber pembiayaan eksternal.
- Pengeluaran pembiayaan yang meningkat drastis pada tahun 2023 bisa mencerminkan pembayaran utang atau investasi besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

### 3. ANALISIS RASIO

#### Analisis Rasio Kota Denpasar

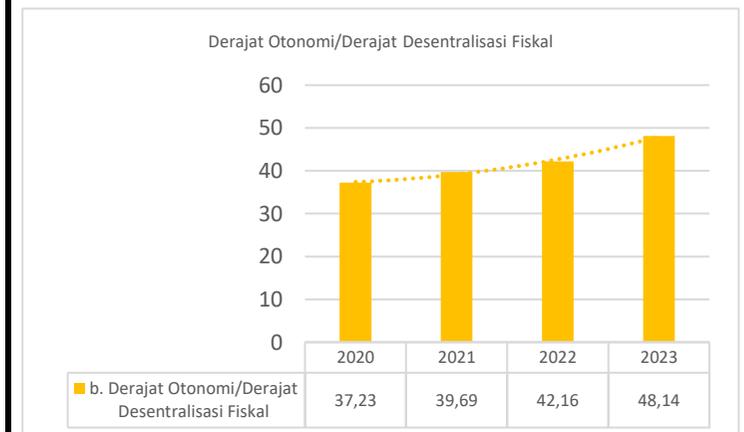
| No | RASIO   | HASIL / NILAI |        |        |        |           | Deskripsi  |
|----|---|---------------|--------|--------|--------|-----------|--|
|    |   | 2020          | 2021   | 2022   | 2023   | Rata-Rata |  |
| 1  | OTONOMI FISKAL  |               |        |        |        |           |  |
|    | a. Kapasitas Fiskal Daerah (Data Dari Kementerian Keuangan) | 0,719         | 1.271  | 1.159  | 1.432  |           |  |
|    |   | Rendah        | Sedang | Rendah | Sedang |           |  |
|    | b. Derajat Otonomi/Derajat Desentralisasi Fiskal            | 37,23         | 39,69  | 42,16  | 48,14  | 41,81     | Tingkat derajat otonomi fiskal sebesar 41,81 berarti Kota Denpasar masuk dalam kategori mandiri dalam menghasilkan PAD |
|    | c. Tingkat Ketergantungan                                   | 57,05         | 55,85  | 57,10  | 51,08  | 55,27     | Tingkat ketergantungan sebesar 55,27 berarti Kota Denpasar masih bergantung kepada pusat                               |
|    | d. Kapasitas Riil Pendanaan                                 | 60,64%        | 56,29% | 58,18% | 63,64% | 59,69%    | 59,69% uang daerah bisa digunakan untuk mendanai pembangunan   |
| 2  | KELAYAKAN KREDIT  |               |        |        |        |           |  |
|    | a. Solvabilitas   | 251,5         | 128,8  | 293,7  | 153,3  | 206,81    | Aset Pemda mempunyai kemampuan membayar hutang sebanyak 206,81 kali  |
|    | b. Quick Ratio  | 24,55         | 14,75  | 35,70  | 20,17  | 23,79     | Pemda dapat membayar hutang dengan cepat. 23,79 kali dari jumlah hutang jangka pendek sekarang                         |

#### Kapasitas Fiskal Daerah



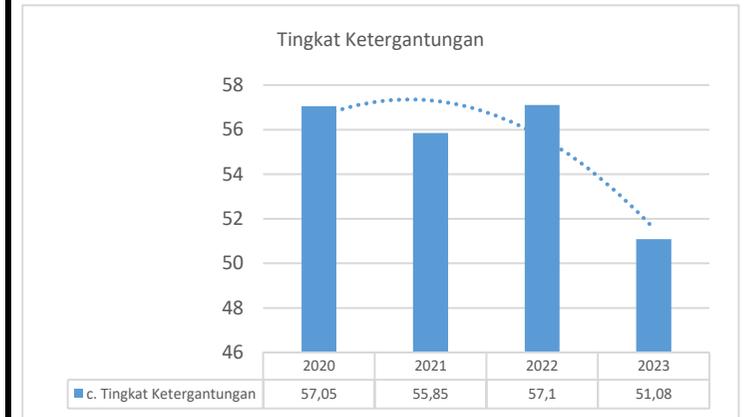
- Kapasitas Fiskal berdasarkan data kementerian keuangan Kota Denpasar pada tahun 2023 termasuk kedalam kategori Sedang, artinya bahwa kemampuan keuangan untuk pengelolaan kota masih bergantung pada Pemerintah Pusat.
- **Trend:** Kapasitas fiskal daerah menunjukkan peningkatan dari 0,719 pada tahun 2020 menjadi 1,432 pada tahun 2023.
- **Kategori:** Meskipun nilai tahun 2020 berada pada kategori rendah, nilai pada tahun-tahun berikutnya berada di kategori tinggi dan sedang, menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang signifikan.

#### Derajat Otonomi/Derajat Desentralisasi Fiskal



- Trend: Nilai ini meningkat dari 37,23 pada tahun 2020 menjadi 48,14 pada tahun 2023.
- Kategori: Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Denpasar semakin mandiri dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata derajat otonomi sebesar 41,81.

#### Tingkat Ketergantungan



- **Trend:** Tingkat ketergantungan menurun dari 57,05 pada tahun 2020 menjadi 51,08 pada tahun 2023.
- **Kategori:** Meskipun masih ada ketergantungan pada pusat, tren penurunan ini menunjukkan bahwa Kota Denpasar semakin berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, dengan rata-rata tingkat ketergantungan sebesar 55,27.

#### Kapasitas Riil Pendanaan:

Trend: Kapasitas riil pendanaan sedikit fluktuatif namun meningkat dari 60,64% pada tahun 2020 menjadi 63,64% pada tahun 2023.

Kategori: Rata-rata 59,69% menunjukkan bahwa sebagian besar dana daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, menunjukkan kemampuan pendanaan yang cukup baik.

#### Solvabilitas:

Trend: Solvabilitas menunjukkan fluktuasi besar, dengan nilai tertinggi pada 2022 (293,7) dan terendah pada 2021 (128,8).

Kategori: Rata-rata solvabilitas 206,81 kali menunjukkan bahwa aset daerah memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk membayar utang, yang mencerminkan kesehatan keuangan daerah yang sangat baik.

**Quick Ratio:**

Trend: Quick ratio juga mengalami fluktuasi, dari 24,55 pada tahun 2020 menjadi 20,71 pada tahun 2023.

Kategori: Dengan rata-rata 23,79 kali, ini menunjukkan bahwa Pemda dapat dengan cepat membayar utang jangka pendeknya, yang mencerminkan likuiditas yang baik.

Dari hasil analisis rasio Kota Denpasar

Otonomi Fiskal: Kota Denpasar menunjukkan peningkatan yang baik dalam kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal, serta berusaha mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Kelayakan Kredit: Kota Denpasar memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membayar utang, dengan solvabilitas dan quick ratio yang tinggi.

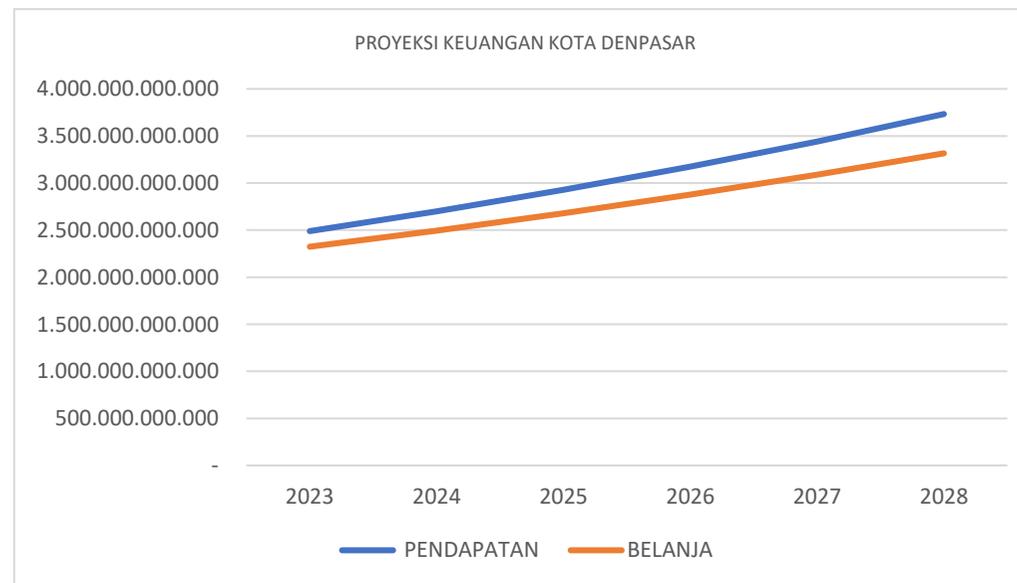
Dari hasil analisis rasio tersebut Kota Denpasar perlu meningkatkan PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan dan optimalisasi pemungutan pajak, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, mempertahankan manajemen utang yang baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

#### 4. PROYEKSI KEUANGAN / PROGRAMAN INVESTASI

##### Proyeksi Keuangan

Tabel Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kota Denpasar Tahun 2024-2028

| URAIAN            | RATA-RATA<br>PERTUMBUHAN | 2023<br>Eksisting    | 2024<br>Proyeksi     | 2025<br>Proyeksi     | 2026<br>Proyeks      | 2027<br>Proyeksi     | 2028<br>Proyeksi     |
|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PENDAPATAN</b> | 8,44%                    | 2.489.157.399.307,54 | 2.699.307.911.332,49 | 2.927.200.667.265,62 | 3.174.333.580.273,36 | 3.442.331.026.886,43 | 3.732.954.523.841,99 |
| <b>BELANJA</b>    | 7%                       | 2.323.885.541.298,14 | 2.495.083.521.097,25 | 2.678.893.459.517,57 | 2.876.244.465.071,07 | 3.088.134.092.627,11 | 3.315.633.385.776,97 |



Berdasarkan grafik diatas Proyeksi pendapatan belanja Kota Denpasar diproyeksikan sampai dengan tahun 2028, menunjukan pendapatan lebih tinggi dari belanja, Kondisi ini didapat dari tren pertumbuhan rata rata bahwa di Kota Denpasar pertumbuhan rata rata pendapatan lebih tinggi dibanding dengan rata rata pertumbuhan belanja. Diharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan baik dari PAD, transfer pemerintah pusat maupun sumber lain, adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pengeluaran untuk mendukung pembangunan dan layanan publik.

Berdasarkan hasil analisis perlu adanya prioritas dalam mengoptimalkan pendapatan.

Dengan demikian maka perlu adanya perencanaan yang baik dari sektor keuangan melalui sasaran/program pembangunan jangka menengah daerah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD:

- Peningkatan kualitas infrastruktur
- Peningkatan kualitas Pendidikan
- Peningkatan kualitas Kesehatan
- Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Pengembangan Pariwisata dan ekonomi Kreatif
- Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kesejahteraan Sosial
- Pengembangan Transportasi Publik

#### **5. RENCANA PENINGKATAN KEUANGAN KOTA**

1. Melakukan optimalisasi potensi pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan
3. Meningkatkan peran Pihak ke 3 dalam pengembangan kota melalui dana investasi berdasarkan potensi daerah

\*) Pada laporan ringkasan dilampirkan dokumen Perkada tentang penjabaran APBD per tahun (2020-2023) dalam mengisi form laporan ringkasan Pengembangan MFSa ini dapat berimprovisasi sesuai dengan kondisi daerah

**MATRIX ANALISIS KEBUTUHAN Penguatan Kapasitas  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA**

| NO  | URAIAN PERMASALAHAN HASIL ANALISIS   | KEBUTUHAN PELATIHAN |       |                 | SASARAN   | TUJUAN PENCAPAIAN   | JENIS PELATIHAN               | MATERI PELATIHAN   | NARASUMBER AHLI |
|-----|--|---------------------|-------|-----------------|---|---|-------------------------------|--|-----------------|
|     |  | YA                  | TIDAK | PEMBERIAN MODUL |   |   |                               |  |                 |
| (1) | (2)  | (3)                 | (4)   | (5)             | (6)   | (7)   | (8)                           | (9)  | (10)            |
| I   | Pendapatan   |                     |       |                 |   |   |                               |  |                 |
| 1   | Kurang nya pengetahuan dasar tentang pengelolaan pendapatan  |                     | ✓     | ✓               | Staf pengelola                                      | Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan pendapatan daerah  | -                             | Modul Dasar Pengelolaan Pendapatan Daerah                        | LMS             |
| 2   | Rendahnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi   | ✓                   |       | ✓               | staf pengelola sektor pajak                         | Optimalisasi Capaian pendapatan dari sektor pajak   | Pelatihan Kompetensi Keahlian | Strategi Optimalisasi pendapatan dari sektor Pajak               |                 |
| 3   | Kurangnya inovasi dalam pelayanan pajak dan retribusi  | ✓                   |       | ✓               | staf pengelola sektor pelayanan pajak dan retribusi | Optimalisasi Capaian pendapatan dari sektor   | Pelatihan Kompetensi Keahlian | Strategi Optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi              |                 |
| II  | Belanja  |                     |       |                 |   |   |                               |  |                 |
| 1   | Kurang nya pengetahuan dasar tentang pengelolaan belanja   |                     | ✓     | ✓               | Staf pengelola                                      | Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan belanja daerah   | -                             | Modul Dasar Pengelolaan belanja daerah                           | LMS             |
| 2   | Adanya Gap antara perencanaan dengan realisasi dalam pengelolaan belanja   | ✓                   |       | ✓               | Staf pengelola perencanaan pembangunan              | Meningkatkan Efektifitas dalam perencanaan  | Pelatihan Kompetensi Keahlian | Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran keuangan daerah        |                 |
| 3   | Adanya Gap antara belanja operasi dengan belanja modal yang terlalu jauh   | ✓                   |       | ✓               | Staf Pengelola                                      | Meningkatnya kemampuan staf dinas dalam pengelolaan belanja dan meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan kota | Pelatihan Kompetensi Keahlian | Efektifitas Pengelolaan proporsi belanja daerah yang ideal       |                 |
| III | Peran Pihak ke-3 dalam pengelolaan kota  |                     |       |                 |   |   |                               |  |                 |
| 1   | Kurangnya optimalisasi potensi Sumber Daya dan kurangnya keterlibatan pihak ke-3 dalam percepatan Pembangunan kota | ✓                   |       | ✓               | Staf pengelola                                      | Meningkatnya pertumbuhan ekonom daerah  | Seminar                       | Strategi peningkatan investasi pihak ke-3 dalam Pembangunan kota |                 |